

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya menjadi target utama yang sangat penting yang harus tercapai dalam proses pembangunan ekonomi. Maka dari itu awal pembanguana ekonomi umumnya berorientasi pada masalah pertumbuhan. Kebijakan dan peran pemerintah sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap pergerakan perekonomian dalam negara. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam ekonomi yaitu kebijakan fiskal, yang berupa perubahan belanja pemerintah bermaksud mempengaruhi belanja agregat dalam ekonomi dan perubahan dalam perpajakan. Sedangkan peran pemerintah dalam sistem kapitalis murni dalam perekonomian moderen memiliki 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1999).

Pembangunan nasional tujuan utamanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembanguna ekonomi regional bagian intergal dari pembangunan nasional, tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi bisa tercapai bila didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pada skala perekomian daerah atau otonomi daerah, perumbuhan ekonomi regional diukur dengan perumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Pada teori keynes tertulis bahwa pertumbuhan pendaptan ditentukan peningkatan permintaan pengeluaran faktor penentunya, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, impor dan ekspor. Tingkat kemakmuran wilayah merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	-2.61	1.38	2.31	2.79	2,4
Sumatera Utara	3.81	3.94	3.95	4.06	4,16
Sumatera Barat	4.23	4.00	4.07	3.98	3,91
Riau	-2.24	-0.28	0.24	0.01	0,53
Jambi	2.44	2.65	2.93	3.12	2,84
Sumatera Selatan	2.98	3.65	4.16	4.73	4,46
Bengkulu	3.44	3.63	3.38	3.43	3,46
Lampung	3.95	4.01	4.09	4.23	4,3
Bangka Belitung	1.89	1.95	2.35	2.39	1,32
Kep. Riau	3.03	2.12	-0.69	1.94	2,35
Dki Jakarta	4.84	4.84	5.21	5.22	4,98
Jawa Barat	3.52	4.17	3.89	4.26	3,72
Jawa Tengah	4.68	4.49	4.52	4.59	4,72
Di Yogyakarta	3.75	3.87	4.11	5.06	5,48
Jawa Timur	4.80	4.96	4.87	4.94	5
Banten	3.24	3.14	3.67	3.81	3,59
Bali	4.80	5.13	4.41	5.20	4,54
Nusa Tenggara Barat	20.20	4.50	-1.11	-5.56	2,85
Nusa Tenggara Timur	3.22	3.44	3.44	3.48	3,56
Kalimantan Barat	3.28	3.63	3.66	3.62	3,6
Kalimantan Tengah	4.64	4.05	4.47	3.46	4,02
Kalimantan Selatan	2.08	2.71	3.64	3.54	2,57
Kalimantan Timur	-3.37	-2.50	0.99	0.60	2,72
Kalimantan Utara	-0.43	-0.24	2.98	2.30	3,19
Sulawesi Utara	5.00	5.08	5.27	5.01	4,71
Sulawesi Tengah	13.68	8.24	5.49	4.72	5,62
Sulawesi Selatan	6.08	6.34	6.17	6.06	5,96
Sulawesi Tenggara	4.68	4.36	4.65	4.36	4,5
Gorontalo	4.57	4.90	5.14	4.95	4,89
Sulawesi Barat	5.30	4.04	4.43	4.32	3,77
Maluku	3.66	3.94	4.05	4.20	3,87
Maluku Utara	3.94	3.67	5.59	5.88	4,18
Papua Barat	1.56	1.96	1.52	3.74	0,29

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tabel 1.1 dapat dilihat laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per Provinsi mengalami

fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil maka mulai diperbaiki dan diantisipasi dengan menurunkan suku bunga bank agar kegiatan ekonomi sektor riil bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Usaha untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan baik daerah maupun pusat, dalam perencanaan tersedia dana, dengan alokasi dana yang merata dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan sumber pendapatan yang optimal, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus diprioritaskan (Ompusunggu, 2010)

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau otonom daerah yaitu meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD. Untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi pemerintah melakukan berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan pembelanjaan dan pembayaran yang digunakan untuk kegiatan pemerintah di bidang ekonomi dan yang berkaitan. Menurut (Wahyudin and Yuliadi, 2013) dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan bisa mengalokasikan belanja daerah dengan efektif untuk kepentingan publik dengan memperbaiki sarana prasarana yang menunjang pembangunan daerah agar meningkatkan pertumbuhan. Dalam berbagai penelitian pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah yang dilihat dari rasio antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikenal dengan istilah *government size* seperti penelitian (Santika and Qibthiyah, 2020). Dalam penelitian ini *government size* yang digunakan adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pembelanjaan pemerintah atau pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan komponen penyusun Produk Domestik Bruto (atau PDRB) dalam skala regional). Kebijakan pemerintah daerah dalam kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah

daerah berupa belanja daerah, menurut (Ratnadi, Ariyanto and Wirawati, 2016) dalam penetapan belanja daerah harus dipertimbangkan Analisa Standar Biaya (ASB). Untuk melakukan perhitungan ASB diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah. Pembelanjaan pemerintah terdiri dari 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung itu belanja yang dikeluarkan terkait secara langsung pada pelaksanaan program pemerintah, sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak terkait langsung dengan program pemerintah.

Realisasi pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 1.2, secara keseluruhan belanja didominasi belanja barang dan jasa. Tahun 2019 belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 27,29 persen atau kenaikan anggaran sebesar 89,48 triliun dibandingkan tahun 2018. sedangkan belanja tidak langsung didominasi belanja pegawai disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 belanja pegawai dianggarkan mengalami kenaikan sebesar 99,20 triliun rupiah atau sebesar 15, 31 persen.

Tabel 1. 2 Realisasi *Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah)*

Jenis Belanja	2015	2016	2017	2018	2019*)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	143 156	157 922	186 536	198 763	219 129
1. Belanja Pegawai	30 808	41 421	72 447	80 187	89 194
2. Belanja Bunga	61	56	69	77	188
3. Belanja Subsidi	694	948	1 489	2 875	5 049
4. Belanja Hibah	39 957	53 832	46 838	51 941	50 349
5. Belanja Bantuan Sosial	3030	3 405	4 130	4 964	5 345
6. Belanja Bagi Hasil	32 794	35 734	40 014	40 947	46 230
7. Belanja Bantuan Keuangan	27 730	22 466	21 324	17 650	21 628
8. Pengeluaran Tidak Terduga	81	62	195	120	1 144

B. BENAJA LANGSUNG	103 886	106 177	120 503	127 667	163 497
1. Belanja Pegawai	6 430	7 367	8 365	5 845	10 009
2. Belanja Barang dan Jasa	52 298	54 033	64 809	70 299	89 484
3. Belanja Modal	45 158	44 777	47 329	51 522	64 003
JUMLAH/TOTAL	247 042	264 099	307 039	326 430	382 626

Data APBD

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto, 2013), yang meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011, mendapatkan hasil bahwa belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan, yang itu artinya pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk membuat program dan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Aliran dana yang mengalami kenaikan pada belanja langsung diharapkan dapat memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat, semakin besar alokasi belanja langsung dalam APBD dapat memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan masyarakat, sedangkan aliran dana pada belanja tidak langsung prinsipnya alokasi dana bertujuan untuk menopang dan menjujung aktivitas penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya (Rudibdo, Hadi, 2015).

Faktor lain yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah investasi kapital biasanya diindikasikan oleh pembentukan modal tetap bruto sesuai dengan penelitian (Santika and Qibthiyah, 2020). Investasi itu sendiri merupakan pilar pertumbuhan ekonomi, investasi di jadikan titik tolak bagi kelanjutan dan keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang, karena peran investasi dalam perekonomian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya dengan adanya

peningkatan produksi, peningkatan kualitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja menurut (Yuliadi, 2012).

Kontribusi yang diberikan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tidak terlalu besar dan memiliki trend yang fluktuatif pada tahun 2015 hingga 2019, walau begitu setiap tahunnya mengalami kenaikan itu adalah hal positif dapat dilihat pada tabel 1.3. hal ini mengartikan bahwa adanya peningkatan alokasi dana yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik yang berupa bangunan, mesin, dan peralatan khususnya teruntuk masyarakat agar pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Tabel 1. 3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen)

Provinsi	2019	2018	2017	2016	2015
Aceh	6.79	3.36	-2.90	7.14	3.61
Sumatera Utara	8.59	6.96	5.03	4.85	3.87
Sumatera Barat	4.96	3.20	4.43	6.28	4.33
Riau	2.61	3.77	1.43	3.60	4.02
Jambi	3.62	2.12	3.75	4.33	-1.00
Sumatera Selatan	1.69	3.74	5.90	8.19	0.25
Bengkulu	4.88	5.72	6.08	5.02	3.49
Lampung	4.62	8.62	7.50	9.26	5.43
Kep. Bangka Belitung	5.87	6.02	6.32	6.39	4.42
Kep. Riau	6.04	9.06	1.48	3.21	3.25
Dki Jakarta	1.29	4.67	6.03	1.55	2.64
Jawa Barat	4.11	5.88	6.28	4.59	4.16
Jawa Tengah	4.85	7.68	7.50	5.99	5.24
Di Yogyakarta	9.74	10.17	4.97	5.97	4.34
Jawa Timur	4.92	6.08	5.29	6.00	5.84
Banten	7.00	7.02	9.00	6.30	5.72
Bali	3.99	9.04	3.54	8.78	6.69
Nusa Tenggara Barat	7.19	5.19	2.95	8.17	11.61
Nusa Tenggara Timur	3.38	4.44	6.21	15.74	11.88
Kalimantan Barat	1.39	2.82	2.33	0.52	5.70
Kalimantan Tengah	3.16	5.65	4.02	5.25	6.70
Kalimantan Selatan	6.37	8.01	4.30	3.38	5.34

Kalimantan Timur	4.79	7.54	2.75	-6.04	-1.47
Kalimantan Utara	3.64	5.13	3.99	7.03	8.56
Sulawesi Utara	6.88	4.78	7.25	6.30	9.52
Sulawesi Tengah	20.35	1.73	3.51	13.92	14.20
Sulawesi Selatan	5.67	5.72	8.21	7.11	8.08
Sulawesi Tenggara	5.30	5.68	7.99	7.65	4.22
Gorontalo	3.32	4.13	3.05	5.52	8.86
Sulawesi Barat	6.04	5.39	7.92	11.16	6.78
Maluku	6.06	8.62	6.14	7.32	3.75
Maluku Utara	67.06	10.26	14.95	10.86	10.19
Papua Barat	5.36	3.54	2.68	4.63	10.95

Sumber : bps.go.id

Seperti pada penelitian (Santika and Qibthiyah, 2020), pada penelitiannya menyatakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan yang artinya peningkatan dalam investasi akan meningkatkan PDRB per kapita. Seperti dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar menyatakan semakin banyak melakukan investasi maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat (Todaro, dan Smith, 2013:138).

Penduduk merupakan modal pembangunan, dalam Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang terdiri dari empat komponen yaitu harapan hidup untuk kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah mengukur capaian pembangunan untuk pendidikan, dan kemampuan daya beli untuk capaian pembangunan untuk hidup layak. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan dan kesehatan merupakan modal manusia, yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pada penelitian (Santika and Qibthiyah, 2020), bahwa rata-rata lama sekolah tidak signifikan karena secara teori dianggap paling tepat menjadi pengukuran parsial dari data modal manusia.

Dalam Islam sudah tegas memberi garis kepada penguasa meminimalkan ketidak seimbangan dan kesenjangan dalam alokasi dana. Adapun Ayat yang

menerangkan tentang alokasi dana yang benar, yaitu (QS AL-Furqan 67) :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :

“Dan orang-orang yang membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”. (QS AL-Furqan:67)

Maka dari ayat diatas menunjukkns bahwa Islam telah mengatur distribusi harta kekayaan, dapat dilihat dengan larangan membelanjakan hartanya secara berlebih lebihan, dan larangan untuk bersikap kikir dimana sikap tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya yang dikeluarkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain serta masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah yang tercermin dalam kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah daerah pada tahun 2006 pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, dulu pengeluaran pemerintah daerah dikenal dengan belanja aparatur dan belanja publik. Belanja daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah daerah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang paling efisien dan efektif sesuai dengan penelitian (Rudibdo, Hadi, 2015)

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya dapat memperlihatkan keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan pembanguna di daerah tidak hanya di tentukan pengeluaran pemerintah tetapi juga ditentukan oleh besarnya investasi dan human (pembentukan modal manusia) seperti penelitian (Santika and Qibthiyyah, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan keterpengaruh government size terhadap ekonomi. Untuk itu penulis membuat judul penelitiannya adalah **“Pengaruh Government Size Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 2015-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh alokasi belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh alokasi belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian berguna untuk mengetahui dan menjeleaskan :

1. Menganalisis pengaruh pembentukan modal tetap bruto terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019
2. Menganalisis pengaruh alokasi belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019
3. Menganalisis pengaruh alokasi belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019

4. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi regional 2015-2019

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dengan permasalahan penelitian yang sama, diantaranya :

1. Pihak Penulis

Penelitian digunakan sebagai hasil dari penerapan ilmu yang diperoleh dimasa di bangku perkuliahan dan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam government size terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau informasi keterkait dengan penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk penelitian berikutnya terkait government size terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai government size terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian in diharapkan mampu untuk menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam hal kebijakan yang akan diambil, terutama dalam mengenai pengalokasian belanja teruntuk kesejahteraan masyarakat.